

RANCANGAN AWAL RENJA TAHUN 2025



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya

Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Banda Aceh Tahun 2025 dapat tersusun dengan baik.

Recana Kerja (Renja) merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang tersususn dengan

memedomani Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Rencana

Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026. Secara Substansi, dokumen

Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025 memuat hasil

evaluasi Renja tahun lalu (n-2), tujuan dan sasaran, serta rencana kerja dan pendanaan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan

dan dukungan dalam penyusunan dokumen Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tehun 2025. Semoga Allah SWT

senantiasa meridhai kita semua.

Banda Aceh, 24 November 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Andri, S.STP,. M,Si

Pembina / NIP. 19840323 200212 1 002

i

# **DAFTAR ISI**

KATA PE	ENGANTAR	i
DAFTAR	ISI	ii
EXECUTI	IVE SUMMARY	16
BAB I PI	ENDAHULUAN	1
1.1.	LATAR BELAKANG.	1
1.2.	LANDASAN HUKUM	2
1.3.	MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4.	SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II H	ASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra	
	Perangkat Daerah	6
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	17
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	19
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	19
3.2.	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	19
3.3.	Program dan Kegiatan	20
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
DAG VI	DEALL ITLID	34

## **EXECUTIVE SUMMARY**

Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai Indikator kinerja dan pendanaan sesuai degan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Penyusunan berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) Kota Banda Aceh yang akan dijabarkan pula dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2025.

Berdasarkan RENSTRA DPMPTSP terdapat 6 (enam) Program dan 12 (dua belas) Kegiatan yang direncanakan termuat dalam Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2025. Adapun Program dan Kegiatan tersebut untuk mendukung pencapaian target kinerja yakni jumlah nilai Investasi Kota Banda Aceh sebesar 630,06 Triliun, pencapaian nilai indeks kepuasan masyarakat sebesar 90,77.

Rencana anggaran belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu tahun 2025 dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8,864,341,476,-, yang terbagi kedalam 6 program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, dan Program Pengolahan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

# BAB I PENDAHULUAN

# 1.1. LATAR BELAKANG.

Rancangan Awal Renja Dinas Penananam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disususn secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan seuai dengan amanat Undang — undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta berpedoman kepoada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), yang didalamnya memuat kebijakan, program, dan kegiatan Pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menjelaskan tentang Langkah — Langkah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Dalam kedudukannya Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu sebagi salah satu produk perencanaan daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah strategi jangka menengah dengan perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh selaku Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh. Dalam menyusun Rencana Kerja harus memperhatikan kesesuaian capaian output antar kegiatan dalam satu program maupun dengan prorgam lain, selain itu harus ada keselarasan program dengan issue strategis daerah yang memuat dalam rancangan awal RKPD Kota Banda Aceh.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu tahun 2025 mengacu pada dokumen – dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPD Kota Banda Aceh tahun 2023 – 2026 dan Renstra DPMPTSP tahun 2023 – 2026 dan mempedomani Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yaitu Tetang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan intervensi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

Dokumen Rancangan Awal Renja tahun 2025 ini disusun sebagi acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (RAPBK) kota Banda Aceh yang dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Anggaran (RKA) DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2025.

#### 1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Rancangan Awal Renja DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2024 antara lain sebagai berikut :

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- 4. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Nasional;
- 8. Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat;

- 11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah:
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor 81 tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum;
- 18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi RI Nomor KEP/24/M.PAN/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 yaitu Tetang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan intervensi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah;
- 20. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Thaun 2016 nomor 2);
- 21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan;

- 22. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
- 23. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023 2026;
- 24. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
- 25. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 116 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
- 26. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 09 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Banda Aceh Tahun 2023-2026;

# 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Rancangan Awal Renja DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah menyediakan informasi mengenai rencana kerja tahun 2025 serta sebagai dokumen acuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program Pembangunan urusan Penanaman Modal untuk kurun waktu satu tahun secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan sesuai deangan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2023 – 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Banda Aceh (RPD) tahun 2023 – 2026 sebagai arah dan pedoman untuk menjabarkan perencanaan pembangunan pada bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu di kota Banda Aceh selama satu tahun anggaran yaitu tahun 2025 yang dituangkan dalam program dan kegiatan OPD.

Sementara, tujuan dari penyusunan Rencana Awal Renja DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2025 adalah sebagai bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan OPD untuk menunjang pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kota Banda Aceh sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD dimana tujuan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah "Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan dan Pertumbuhan Ekonomio Yang Kondusif Melalui Kebijakan Penanaman Modal",

Dalam penyusunan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kota Banda Aceh tahun 2024. Adapun pencapaiannya dapat dilihat pada capaian Indikator Kinerja Utama( IKU ) yang targetnya telah ditetapkan didalam Renstra.

## 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rancangan Awal Renja DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan R

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun sistematika penyusunan Rancangan Awal Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun 2024 disusun menurut sistimatika sebagai berikut :

#### Sistematika Penulisan:

#### BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

## BAB II Hasil Evaluasi Renja DPMPTSP Kota Banda Aceh Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

# BAB III Tujuan dan Sasaran DPMPTSP Kota Banda Aceh

- 3.1 Telahaan terhadap kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

## BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan DPMPTSP Kota Banda Aceh

4.1 Tabel Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran

# **BAB V Penutup**

#### **BAB II**

# HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

# 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Dalam rangka pencapaian target kinerja tahun 2023, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Tepadu Satu Pintu, melaksanakan Evaluasi pelaksanaan Renja yang dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan. Kepala OPD menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Bila berdasarkan hasil evaluasi oleh Bappeda ditemukan adanya ketidak sesuaian/penyimpangan, maka Kepala OPD melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja OPD dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra OPD, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah. Kemudian di fokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP Kota Banda Aceh tahun 2023 – 2026.

Pada tahun 2023 terjadinya Perubahan anggaran DPMPTSP Kota Banda Aceh dari sebelumnya sebesar Rp. 8.164.818.873,- menjadi Rp. 7.992.313.742,- yang di bagi kedalam 2 (dua) pembelanjaan, yaitu:

- 1) Belanja Operasi (Belanja Pegawai & Belanja Barang dan Jasa) Rp. 7.970.259.742,-
- 2) Belanja Modal (Belanja Modala Peralatan dan Mesin) Rp. 22.054.000,-

Realisasi belanja pada tahun anggaran 2023 s/d Oktober adalah sebesar Rp.6.135.100.855,-

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

# 1. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah.

Realisasi Fisik: 69,29% dan Realisasi Keuangan: 79,12% dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jih Anggaran		Realisasi	Sisa (Rp)	
		(Rp)	Fisik	Realisasi Keu	angan	
			%	Rp	%	
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.840.935	100	-	-	4.840.935
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.955.136.55 2	90	4,128,363,68 0	77,72	1,183,319,480
3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.795.797	75	99,094,703	74,62	33,697,244

4.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan	22.054.000	00		-	22.054.000
	Pemerintahan Daerah					
5.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,468,695,04 3	95	1,312,633,31 2	84,99	156,061,731
6.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116,370,101	55	41,318,630	35.51	75,051,471

# 2. Program Promosi Penanaman Modal.

Realisasi Fisik: 0% dan realisasi Keuangan: 0%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jlh Anggaran (Rp)		Sisa (Rp)		
			Fisik	Realisasi Keuanga		1
			%	Rp	1	
1.	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-	00,00	-	00,00	-

# 3. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Realisasi Fisik: 30 % dan realisasi Keuangan: 29,88 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jih Anggaran (Rp)		Realisasi				
	}		Fisik	Realisasi				
			%	Rp	%			
1.	Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	_	00,00	-	00,00	-		

# 4. Program Pelayanan Penanaman Modal.

Realisasi Fisik: 30 % dan realisasi Keuangan: 29,88 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jih Anggaran (Rp)		Sisa (Rp)			
			Fisik	Realisasi k			
			%	Rp	%	7	
1.	Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan	17,436,115	70,00	5,210,130	29,88	12,225,985	

# 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Realisasi Fisik: 41 % dan realisasi Keuangan: 61,45 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jih Anggaran (Rp)	<u>-</u> -	Realisasi		Sisa (Rp)
			Fisik			
			%	Rp	%	

1.	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan	333,900,000	95.00	205,177,400	61.45	128,722,600
	Penanaman Modal yang menjadi					
	Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota.					

# 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Realisasi Fisik: 52 % dan Realisasi Keuangan: 51,38 %, dengan rincian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Jih Anggaran (Rp)		Sisa (Rp)		
			Fisik	Realisasi Ke	1	
			%	Rp	%	1
1.	Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	644,192,000	52.00	331,000,000	51.38	313,192,000

 Realisasi program dan kegiatan yang memenuhi target kinerja dengan tahun 2023 adalah sebagai berikut;

Terdapat 10 (Sembilan) kegiatan pada 6 (enam) program yang belum memenuhi target Renja dan Renstra DPMPTSP, yaitu :

- a. Program Penunjang Urusan Pemeritahan Daerah
  - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (90%)
  - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah (75,75%)
  - Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penujang Urusan Pemerintahan
     Daerah (0 %)
  - Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (95%)
  - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan
     Pemerintahan Daerah (55%)
- b. Program Promosi Penanaman Modal
  - Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi
     Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (0%)
- c. Porgram Pengembangan Iklim Penanaman Modal
  - Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitasi/Insentif Dibidang Penanaman
     Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (0%)
- d. Program Pelayanan Perizianan Penanaman Modal
  - Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu PIntu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan (70%)
- e. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

- Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi
   Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota (95%)
- f. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
  - Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang
     Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (52%).
- 2) Realisasi program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
  - Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat
     Daerah (100%)
- Realisasi program dan kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Tidak ada program dan kegiatan yang melebihi target yang telah ditetapkan

4) Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/ kegiatan/ sub kegiatan;

Faktor penyebab belum tercapinya target pada beberapa program dikarenakan capaian tahun berjalan belum selesai, dan terjadinya pengalihan anggaran pada kegiatan yang lebih stategis.

- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; Secara keseluruhan keterkaitan yang timbul dengan pencapaian target capaian program Renstra yang belum sesuai, peningkatan sarana dan prasarana serta SDM untuk mendukung pelayanan secara digitalisas, tidak mampunya secara terus menerus menggali potensi investasi daerah akibat keterbatasan sumber daya, sehingga tidak menemukan potensi ungulan investasi.
- 6) Kebijakan atau Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut;

Kebijakan atau Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi keterbatasan anggaran yang berdampak pada keterbatasan kegiatan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evalusi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra
Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 Kota Banda Aceh

					Haven (Bidens Haven					sasi Target Kinerja	_	ilisasi Kinerja Program Keglatan Tahun 2023		Target Program, Kegiatan	Perkiraan Realisa Renstra Perang Tahur	
		Kode	e		Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	indikator Kinerja Program (outcome) /Kegiatan (output)		ogram (Renstra (kat Daerah) Tahun 2023-2026	Tahun 2022 (n-3)		Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	dan Sub Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 (n-1)	Realisasi Capalan Program, Keglatan dan Sub Keglatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023 (n-1)	Tingkat Capalan Realisasi 'Target Renstra (%)
		(1)			(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8) * (7/6)	(9)	[10] = (5+7+9)	(11) = (10/4)
		1			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENAI	NAMAN MODAL			Ī			7,628,729,812				
2	18	Q2			Program Penunjang Urusan Pernerintah Daerah Kab/Kota	Persentase pemeruhan kebutuhan perunjang perangkat daerah	100	%	100	*	100%	7,603,606,312		100%	100	*
2	18	62	2.01		Kegisten Perencenean, Penganggorier, dan Evaluasi Kinorja Parangkat Daarah	Persentase dokumen perancessen, penganggaran dan avakasi OPD yang tersulum	100	%	100	*	100%	4,940,123		100%	100	*
2	18	02	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perendanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	9	Dakumen	9	Dakumen	9 Dokumen	4,940,123		9 Dokumen	9	Dokumen
2	18	02			Kegletan Administresi Keuengan Perangkat Dearsh	Persentase pernenulum administrasi keuengan	100	*	100	ж	1,00%	1,831,048,118		100%	100	%
2	18	02	2.02	0001	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediakan	12	Bulan	12	bulan	12 Bulan	4,924,373,118		12 Bulan	12	Bulan
2	18	02	2.02	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Taknis Perkantoran yang disediakan	12	Bulan	12	bulan	12 Bulan	906,675,000		12 Bulan	12	Bulan
2	18	61	2.05		Kegletan Administresi Pegawalan Perangkat Decrah	Persentase pemeruhan Administrasi Kepagawalan Perangkat Daerah	100	*	100	×	100%	49,895,000		100%	10C	*
2	18	01	2.05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakalan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah Pakaian dinas beserta perlengkapan nya yang disediakan	0	Stel .	0	5tel	0 Stel	43,835,000		0 Stel	0	Ştel
2	1.0	01	2.02		Kagiatan Administrasi Umum Parangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang administrasi umum	100	*	100	*	100%	146,968,077		190%	100	×
2	18	01		0001	Sub Keglatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	9	Jenis	9	bulan	9 Bulan	3,463,853		9 Jenis	9	Jenis
2	18	01	2.06	0004	Sub Keglatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6	Jenis	6	Dakumen	6 Dokumen	17,367,638		filenis	6	Jenis
2	18	01	2.06	0005	Sub Keglatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	16	Jenis	15	Dakumen	16 Dokumen	76,156,586		16 jenis	16	Jenis
2	18	01	2.06	0009	200 veRiaraii sauketeliRRataan vabar	Jumlah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang dilaksanakan	24	Laporan	10	laporan	24 La poran	50,000,000		24 Laporan	24	Laporan

2	18	03	Τ		<u> </u>	I				_	200%	20,128,000		100%	100	*
					Program Promosi Pensusyan Model	Persentase Promosi Peranaman Modal	100	*	100	*	300%	20,123,000				
2		•	2.63		Kegistan Penyalanggaraan Premeel Peneruman Mudal yang Manjadi Kesumangan Deersh Kaluputan/ Kalp	Jumish Laparan Panysilanggaraan Promosi Panarawan Madai		Lapuren	1	Lapuren	1 Laparies	38,123,800		1 Laporan	*	Laparin
2	18	03	2.01	02	Sub Kegletan Pelaksansan Keglatan Promosi Penansman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keikutsertaan Pameren Investasi	1	kall	1	Kegiatan	1 Keglatan	20,123,000		1 kali	ı	kali
2	18	04			Program Pelayanen Peneneman Model	Persentasa Tingkat Kapuasan Mesyarakat	100	*	300	%	1,00%			100%	100	*
2	14	04	2.01		Kagistan Palayanan Parlahan dan Man Parlahan sacora Yugusia Sala Minia di Bidang Pasasaman Madali yang manjadi kecesangan Deerah Kabupatan/Kata	Jumish Pelayanan Perlainan dan Maspatchuan Bacara Tarpada Setu Pintu Dibideng Pasarannan Bilalai	2	Laporon	2	Legerya	2 Laporen			2 Laporan	2	Laperun
					Pemantauan pemenuhan komitmen Padzinan dan NonPerizinan Penaneman Modal	Jumish Laporan pelaku usaha yang sudah memenuhi komitmen Perizinan dan Non Perizinan	o	0	1	łaporan	o	0	a	o	o	a
					Penyediaan Jayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyerakat terhadap pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Responden yang mengikuti Survey kepuasan masyarakat	0	o	1	laporen	o	O	a	σ	0	0
2					Sub Kegiatan Pemantsuan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumish Pengawasan Tempat Usaha yang Memiliki izin usaha	200	Palaku Usaha						200 Palaku Usehn		
2	18	04	2.01	0007	Sub Kegiatan Penyediaan tayènen Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayenan Terpedu Perlainan dan Nonperizinan	Jumleh masyarakat yang Dilayani untuk Konsultasi/Pangaduan yang Ditindaklanjuti	500	Masyarekat						500 Mesyeraket		
2	2.5	95			Program Pengendellen Pelaksensan Penanaman Model	Persentase Nijal Penanarasan Modal	100	<b>*</b>	100	*	100%	•		100%	100	*
2	18	CS.	2.01		Kagistan Punyandalan Palaksanaan Panasanan Model yang merjadi Keuranangan Duaruh Kebupatan/Keta	Juralah Lagaran Pangundalan Palaksansan Panangunan Madad	1	Laporen	100	*	100%			140%	100	*
					Koordinesi dan Sinkronisesi Pementauan Pelaksanaan Penanomen Model	Jumlah (aporan pemantauan LKPM	0	o	1	laporan	o	0	0	o	Ó	a
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Model	Jumlah laporan pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan terhadap penyampalan LKPM	0	đ	1	leporan	o	0	a	ō	0	0
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah laporan pengawasan terhadap kepatuhan penyampalan LKPM osih Investor		o	1	leporan	0	0	o	o	0	0
2	16	05	2.01	0004	Sub Kegiatan Penyelesalan Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam mersalisasikan Kegiatan Usahanya.	lumish Leporan pemantauan	1	Kegistan Usaha				 		1 Keglatan Usaha		
2	18	05	2.01	0005	Sub Keglatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Useha.	Jumiah Laporan pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan	1	Pelaku Useha						1 Pelaku Usaha		
2	18	06	2.01	0006	Sub Keglatan Pangawasan Penanaman Model	Jumish laporan Pelaksensan pangawasan Penanaman Model	1	Kegiatan Usaha						1 Keglatan Usaha		

	1					r							1			
*	14	61	2.07		Registan Pengadaan Barang Milik Caesah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase persenden kebutuhan Berang Milit. Deerah Persenjang Urusan Powerintah Dearah.	100	%	30	*	100%	67,574,062		100%	100	**
	- 1				Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	50	Unit	23	unit	50 Unit	59,537,582		50 Unit	50	Unit
2	18	01	2.07	0010	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1	Unit	0	unit	1 Unit	8,036,500		1 Unit	1	Unit
2					Pemerintah Dasrah	Personitase personahan Penyediaan Jasa Personjang Urusan Personistahan Daecah	100	*	80	*	190%	1,977,354,973		100%	100	%
2	18	01	ŀ		Sub Kegiatan Penyedlaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	12	Bulan	12	bulan	12 Bulan	1,190,000,000		12 Bulan	12	Bulan
2	18 0	D1	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Bulan	12	bulan	12 Bulan	187,354,973		12 Bulan	12	Bulan
2	15	8	2.09		Kagietan Pernelihersen Berang Allik Ceersh Penunjang Urusan Pernerintah Ceersh	Persentase persenufuen kebultuhan Penseliheraan Bering MIIIK Daerah Perunjeng Urusun Penserintahan Daerah	109	M	90	*	100%	131,865,998		100%	100	×
2	18	01	2.09		Sub Keglatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Blaya Pemeliharaan , Pajak dan Perlzinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau tapangan	7	Unit	7	unit	7 Unit	43,570,000		7 Unit	7	Unit
1					Sub Keglatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	59	Unit	59	unit	S9 Unit	69,389,474		59 Unit	59	Unit
2	18	01	2.09		Sub Kegistan Pemeliharaan/Rehabilitesi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan Bangunan Leinnya yang dipelihara/direhab	32	Unit	6	unit	32 Unit	18,806,465		32 Unit	32	Unit
2	18	02			Program Pangambangan iklim Pananaman Modal	Persentase Pengembangan iklim Penenaman Modal	100	76	0	0	100%	\$,000,000		100%	100	*
2	130	02	2.01		Kepistan Ponetspan Pemberlan Fasilitas/Insortif Dibidang Penanaman Model yang Menjadi Kewanangan Daerah Kabupatan/Kota	Aurisch Penetapen Pernberten Ezellkas/Inventif Dibideng Penenaman Model	100	*	•	o	100%	2,594,500		100%	100	*
2	18	02	2.01		Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	jumlah Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Moda	1	Dokumen	0	0	1 Dakumen	2,504,500		1 Dokumen	1	Dokumen
2	14	<b>02</b>	2.02		Keglotan Perebuatan Peta Poteral investasi	Juriah Pembuatan Pata Potensi Peneneman Model	100	*	0	0	100%	2,495,500		100%	100	*
2	19	02	2.02		Sub Keglatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota yang dikeluarkan	1	Dokumen	0	o	1 Dokumen	2,495,500		1 Dokumen	i	Dokumen

2	18	06		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Sistem Informasi Penanaman Modal	92.25	Hitai	100	*	100%	•		100%	100	ж
2	19	06	2.01	Perizinen dan Non Perisinen yang Terintegrasi	Jumiah Sistem Informasi Perizinan Berbasis Elektronik yang Terintagrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan dan Man Perizinan	190	*	48000	Poloku Usaho	100%	•		100%	100	*
				Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanana Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pengunjung MPP	D	0	48000	Masyarekat	•	-	0	a	0	0
2	18	06	2.01		Jumlah Sistem Informasi Perlainan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perlainan dan Non Perlainan	1	Dokumen						1 Dokumen		

Note:

\*Warna Pink adalah Sub Kegiatan pada Tahun 2024

# 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dihitung berdasarkan capaian target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah tertuang dalam Renstra DPMPTSP, dalam Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata kerja DPMPTSP antara lain:

- melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 2. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu. Satu pintu.
- 3. Menyusun peta potensi investasi kota.
- 4. Menyelenggarakan promosi penanaman modal.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPD) kota Banda Aceh Tahun 2023 – 2026 memuat tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi DPMPTSP kota Banda Aceh terdapat pada RKP yaitu " Mewujudkan reformasi birokrasi yang berkualitas dan fungsional" dengan sasaran "Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik". Adapun strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan Optimalisasi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintah. Maka dengan mengacu kepada hal tersebut, dalam Renstra DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2023 - 2026 yang telah ditetapkan, Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP kota Banda Aceh untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu:

- 1. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA
- 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tabel 2.2.1. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama

(Kondisi per September 2023)

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	TARGET KINERIA SASARAN TAHUN 2023	REALISASI KINERJA SASARAN TAHUN 2023	CAPAIAN TAHUN 2022
Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasiaonal PMDN/PMA	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	575,27 Milyar	436,915 Milyar	132%
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif Melalui Kebijakan Penanaman Modal.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Pelayanan Penanaman Modal	90,74	93,67	98%
	<u> </u>	Rata - rata Persen	tase Realisasi		77%

Capaian jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN/PMA sampai pada triwulan ketiga mencapai Rp. 401.456.243.662 triliun dengan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp. 57.182.603.920 triliun dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp. 344.273.639 triliun, dengan jumlah 446 Investor.Capaian kinerja pelayanan DPMPTSP kota Banda Aceh hingga Tahun 2023 yang terkait: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada semester I tahun 2023 dengan nilai Indeks 93,67 atau berada pada katagori A ( Sangat Baik). Selain itu juga, penyelenggaraan perizinan DPMPTSP kota Banda Aceh telah memperoleh penghargaan dari Kementerian PAN & RB yaitu Predikat A untuk unit penyelenggara pelayanan publik kategori pelayanan prima lingkup pemerintah daerah Tahun 2022. Terkait dengan capaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada tahun 2022 mendapat nilai B, Nilai ini tentunya masih jauh dari target yang ingin dicapai. Untuk itu kerja besar dan kerja keras dari seluruh stakeholders terutama internal sangat diharapkan. Melalui capaian tersebut diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan DPMPTSP kota Banda Aceh pada masa yang akan datang.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah

NO	Indikator	SPM/ Standar	ikk		Target Re	nstra SKPD		Real	isasi Capaian	Proye	ksi	Catatan
110	markator	Nasional	IMA	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2024)	Tahun (2025)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun (2025)	Tahun (2026)	Analisis
(1)	(2)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu			92.25	90.74	90.75	90.76	92,29	93,67 (kondisi SMT I)	90.76	90.77	
2	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Penanaman Modal dan pelayanan terpadu satu pintu			СС	СС	В	В	В	-	В	В	
3	Persentase Pengembangan Iklim Penanaman Modal			-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
4	Persentase Promosi Penanaman Modal			-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	
5	Persentase Nilai Penanaman Modal		<u> </u>	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	

## 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyerenggarakan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan, sasaran, strategis dan arah kebujakan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Salah satu tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu melakukan pelayanan publik dibidang pelayanan perizinan. Dalam rangka peningkatan sistem pelayanan perizinan Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektornik melalui penerapan Aplikasi *Online Single Submission* (OSS). Penerapan sistem OSS diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan perizinan dengan mengurangi proses birokrasi sehingga mempermudah para pelaku usaha untuk mendapatkan izin berusaha di Indonesia.

Digitalisasi sistem pelayanan perizinan melalui penerapan OSS selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang pada akhirnya dapat mendongkrak daya saing Indonesia. Daya saing suatu daerah merupakan hal yang sangat penting bagi investor untuk menentukan keputusan berinvestasi. Investor cenderung akan memilih daerah yang lingkungan bisnis dengan kebijakan yang ramah, sehingga menjadikan investor menanam investasinya dengan risiko yang dapat dikelola dan terkontrol. Sehingga pada akhirnya dengan perbaikan sistem perizinan diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi khususnya di kota Banda Aceh dan provinsi Aceh.

Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini dirasa masih belum cukup untuk mewujudkan realisasi penanaman modal sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintah daerah terkait sistem OSS baik dalam regulasi maupun sistemnya. Adapun beberapa isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam penyelenggaraan perzinan antara lain:

 Pemerintah perlu segera menerbitkan kebijakan terkait dengan kelembagaan PTSP di daerah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dalam rangka debirokratisasi pelayanan perizinan. Hal ini karena adanya beberapa NSPK sebagai peraturan pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018 dalam mekanisme pelayanannya tidak mewajibkan prosesnya melalui DPMPTSP tetapi langsung melalui perangkat daerah teknis

- Mendorong kejelasan, kepastian dan harmonisasi kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui sistem OSS, baik regulasi maupun sistemnya secara konsisten tidak selalu berubah-ubah;
- Mendorong pemerintah dalam hal sinergitas antara Kementerian/Lembaga dengan daerah dalam mewujudkan deregulasi pelayanan perizinan baik berupa NSPK ataupun rencana penerbitan omnibuslaw yang sesuai dengan maksud dan tujuan diterbitkannya PP No 24 Tahun 2018 dengan melibatkan pemerintah daerah.
- 4. Meningkatkan optimalisasi dan sinkronisasi peran perencanaan dan pengembangan potensi penanaman modal dari BKPM terhadap daerah dalam bentuk program dekonsentrasi yang nyata sehingga potensi dan realisasi penanaman modal di daerah dapat dioptimalkan dengan baik.
- Perlunya fasilitas pelaksanaan Alokasi dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menangani perizinan dan Non Perizinan terlatih, Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan Perizinan dan Non Perizinan.

# BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

# 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata.

Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2020 – 2024 yang merupakan tema pembangunan tahun 2020 – 2024, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi Misi Presiden tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

# 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.

Ranwal Rencana kerja DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2024 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Renstra DPMPTSP kota Banda Aceh 2023 - 2026. Mengacu kepada Renstra ini, maka tujuan yang ingin dicapai oleh DPMPTSP kota Banda Aceh selama lima tahun mendatang yaitu "Mengoptimalkan Reformasi Birokrasi dan tata kelola pemerintahan pada penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu", serta "Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui Kebijakan Penanaman Modal" Sementara itu, sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra DPMPTSP kota Banda Aceh tahun 2023 — 2026 yaitu:

- Optimalnya Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan pada Penanaman Modal.
- 2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui Kebijakan Penanaman Modal.

Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1. Penyederhanaan prosedur Perizinan dan Persyaratan Investasi.
- 2. Peningkatan Kapasitas SDM secara kuantitas dan kualitas
- 3. Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sesuai SOP.

# 4. Optimalisasi Investasi jangka Panjang.

Arah kebijakan DPMPTSP kota Banda Aceh dalam rangka meningkatkan realisasi investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk lima tahun mendatang, antara lain:

- 1. Penyiapan data dukung Investasi dan Sarpras.
- 2. Pembenahan Iklim Investasi dan penguatan Pelayanan terpadu satu pintu.

# 3.3. Program dan Kegiatan.

Program merupakan Kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terrhadap rumusan Program dan kegiatan dalam Renja DPMPTSP tahun 2024 adalah sebagai berikut :

## a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Pencapaian Visi pembangunan Kota Banda Aceh tahun 2023-2026 tidak telepas dari memperkuat tata Kelola pemerintahan yang baik, dengan salah satu sasaran yang ingin dicapai adalah Pertumbuhan Ekonomi yang Kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.

Pertumbuhan ekonomi di Banda Aceh yang sangat tinggi terjadi pada tahun 2016, namun perekonomian Kota Banda Aceh mengalami perlambatan dari 6,31 menjadi 3,39. Kemudian pada tahun 2018 mulai membaik atau meningkat 1,1 persen dibandingkan tahun 2017. Hal ini didukung dengan adanya geliat pertumbuhan kegiatan ekonomi pada sector Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Banda Aceh mengalami perlambatan Kembali tahun 2019 dan 2020 akibat dari pandemic Covid-19 yang menghambat berbagai kegiatan ekonomi di Kota Banda Aceh. Seluruh sector mengalami perlambatan yang pada akhirnya menurunkan secara drastis pertumbuhan ekonomi di Kota Banda Aceh. Strategi peningkatan perekonomian Kota Banda Aceh salah satunya dengan Program Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal yang merupakan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu.

#### b) Pencapaian SDG's

Tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG's) adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan Internasional dimasa mendatang, dibuat oleh perserikatan Bangsa-bangsa dan dipromosikan sebagai tujuan Global untuk pembangunan yang berkelanjutan. SDG's menggantikan MDG's (Tujuan Pembangunan Milenium) yang tidak laku berlaku terhitung mulai akhir 2015. SDG's aktif mulai tahun 2015 hingga 2030.

Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pencapaian SDG's yaitu :

- Terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang Inklusif dan berkelanjutan melalui percepatan dan kemudahan dalam mengurus Perizinan berusaha yang terintegritas secara elektronik: Pembinaan, Pendampingan dan Pengawasan bagi para pelaku usaha melalui kegiatan kunjungan lapangan. Bimtek Implementasi pembinaan perizinan berusaha berbasis resiko dan Bimtek Implementasi pengawasan perizinan perizinan berusaha berbasis resiko serta kegiatan penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha.
- Terjadinya kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua., Ditendai dengan jumlah Investor PMDN/PMA tahun 2023 (kondisi TW III) sebanyak 2,696 investor. Dengan nilai realisasi investasi sebanyak Rp. 436.915.815.354
- 2. Uraian garis besar menengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki tupoksi didalam pencapaian kinerja di bidang Penanaman Modal dan perizinan, program dan kegiatan yang diusulkan pada tahun 2025, yaitu :
  - 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - 1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
  - 1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - 1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 1.2.2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.
  - 1.3. Kegiatan Administrasi Pegawaian Perangkat Daerah.
    - 1.3.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya.

- 1.4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - 1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
  - 1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.
  - 1.4.3. Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
  - 1.4.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 1.5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 1.5.1. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - 1.5.2. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 1.6.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
  - 1.6.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
  - 1.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
  - 1.7.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
  - 1.7.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
  - 2.1. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanamanm Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
    - 2.1.1. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan.
  - 2.2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
    - 2.2.2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
- 3. Program Promosi Penanaman Modal.
  - 3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.

- 3.1.1. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota.
- 4. Program Pelayanan Penanaman Modal.
  - 4.1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
    - 4.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan pelayanan perizinan berusaha melalui system perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik.
    - 4.1.2. Sub Kegiatan Penyediaan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko
- 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
  - 3.4. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
    - 3.4.1. Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.
    - 3.4.2. Bimbingan teknis kepada pelaku usaha
    - 3.4.3. Pengawasan Penanaman Modal.
- 6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
  - 6.1. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
    - 6.1.1. Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanana Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Kegiatan lokasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk tahun 2025 banyak dilaksanakan di Kampung Baru, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Untuk kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilaksanakan dibeberapa tempat di Kota Banda Aceh. Total Program yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 adalh 6 program, 13 kegiatan, dan 24 sub kegiatan, Dengan rencana total jumlah pagu indikatif 2025 mencapai Rp. 8,864,341,476.

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Derah tahun 2025

									Rencana Tahun	2025			1	LESS TATE AND LESS OF THE PROPERTY OF	
		Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Keglatan	БКЖ	Target Cap	Target Capalan Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu indikatif	Sumber Dana	Perting	Target Capalan Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikasif
		:		1	:2	3	4.			ñ	7,	ji.	u.		
	_	$\dashv$			Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan										
~	5	4			DEWILL					8,864,341,476					8,864,341,476
-	2 S				enunjang Urusan Pe merintahan Daerah \Morka	Persentise pemenuhan kebunuhan penunjang perangkat daerah	Ketalah Medileri jurulan un Kan Majak kiro	8	*	8,958,106,312	PAD		18	*	8,058,106,312
~	56 5	2	107		Regulater Perendenastr, Perganggaran, dan Rudiusal Kineda Perengkat Oserah	Persentase dokumen perencanaan, penjanggaran dan evaluad OPD yang tenusun	Ecological Education of the Company	8	æ	1940,123	å		8	ž.	4,940, 123
		12	_ :	8	Subject and the following terminal person property for the person of the following set of the	Communication of the second of	・ ・	4.	District.	800 (984 (108	PAD		ų.	20. Cmg n	4942
~	# T	2	202		Kagi atar Administrasi Keuangan Perangkal Daerah Penentasa pemenuhan administrasi keuangan	Porsentso pomenuhan administrasi keuangan	Act of the district of the state of the stat	18	£.	6,285,548,118	DAU-PAD		108	E	6,285,540,110
**	1.1	;:	- 5	- 8	Sickepath for Asian Story on Therefor Asi	ion de restroppintspare ga, de trijetger ASt. vergoad dak	Red Colored Area or recommendation	<b>;</b> ;	egis t u	इस स्ट च्याह	الجار		15	a. Bu	2 276 673 126
	1.0 1.0	· · · ·	Ľ.	130	Sub-Reg Addr February Address Address Street Reg Andrews Togged Addr.	Lore of Additional Tengal Fording a final and a final	egicy alokamie successors e supaperio	::	ۇر د ئ	800 075 DC	©±0-5#€		E	g.	*::100
~	<b>#</b>	2	205		Kaglatan Admir istrasi Pegawalan Perangkat Daerah	Perser tisse pemenuhan Admirnistrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	Hermite Age (1908)	8	*	43,835,000	PAD		8	<u>a</u> t	43,835,000
**	14. 	11	11	H	Sid Anglister for govern form of the objects.	e en de la company de la compa	Rolls Bronds Aced Brain Linearing	• •	>*¥	49.88 XX	37.9		• •	5%	00.008.69
2	1.6	01	206		Keglatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perser tsse pemeruhan kebutuh an penurjang administrasi umum	Rosse jedji Aliphi ko komphenje. Romanega ziri	188	B,	146,986,077	PAD		8	a.	146,988,077
*/	12.	::	Ë	i:	Country of the second of the s	Lot on yet on the property of the period of	Kota Banda Alehi ka tung-man Tampung kara	q.		\$1. \$1. \$1. \$1. \$1. \$1.	31.3		13	*:	3 4 6 3 16 3
1.	1.:	- ;:	- ; ;	8	Subject of the second section of the second	A. A	Ketz kande Alvin kaldurahman. Kampung kare	13.	· ¢:	27,36,23	37.3		1.	, <b>š</b> , ,	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- '-	12	- ;:	- 8	8	Sub-Neg vier her led ber Bereig Gelengt der Feingger Legt	LETT BY AN URENT BUILDINGS LETT BET MET LETT ATTBUT DECLETES	Auto Bundu Areh Bundunghin an Rampung Kare	:: :::	.e- i	38 381 %	F.C		::		36 St. L.
1.1		::	Ĭ.	7	Sub-Register Genoral Register Register Routing For	es de caster personal activo nas de estractes es de caster personal activo nas de estractes	Kota Banda Aspin Ba Compinion Kampanja Aspin Ba Compinion	¥	1901.57	:x x:3	5.5		l o	7; 1; 1;	<b>30 30 30</b>

17,000,000	Dokumen	-	PAD	17,000,000	Dokumen	1	Kota Banda Aceh	Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota yang dikeluarkan	Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	1000	2.02	22	158	~
17,000,000	×	8	ě	17,000,000	*	15	Keta Banda Acah	Jumlah Pembustan Peta Potensi Penanaman Modal	Keglatan Pembuatan Peta Potensi knyestasi Kabupatan/Kota		2,02	æ	ᇥ	2
20,000,000	Dokumen	p.s	PAD	20,000,000	Dokumen	1	Kota Benda Aceh	Jumlah Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasiitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberlan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0001	2.01	22	18	2
30,000,000	*	ğ	7.00	20,000,000	*	\$	Kota Banda Aceh	Jurish Penetapan Pemberler Fasilitas/Insenti Dibidang Penanaman Modal	Kagistan Penetapan Pemberlan Fasilitas/kraentif Olibidang Penaraman Modal yang Menjadi Kewenangan Deerah Kabupatan/Kota		2.01	æ	55	2
57,000,000	*	复	PAD	37,000,000	*	100	Kota Banda Acah	Persentase Pengembangan ildim Penanaman Modal	Program Pengembangan iklim Penanaman Modal			8	======================================	2
18,906,465	Unit	32	PAD	18,806,465	Unit	æ	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan	Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0100	2.09	22	1.8	2
69,389,474	Unit	72.	PAD	69,389,474	Unit	59	Kota Banda Aceh, Balturrahman, Kampung Baro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	806	2.09	22	- 15	~
43,570,000	Unit	7	PAD	43,670,000	Unit	7	Kota Bande Acek, Balturahman, Kampung Baro	Jumlah Unit Pemeliharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2002	2.09	2		2
121,880,188	×	ğ	Ē	131,866,998	*	100	Kota Banda Acah, Babumahmen, Kempang Baro	Persentase permenuhan kebutuhan Perseliharaan Barang Milit Daerah Pensanjang Unuan Pemarintahan Daerah	Kejiston Pemeliharan Berang Millis Daerah Penunjang Urusan Pemeristah Daerah		2.09	8	₩	2
187,354,973	Bulan	n	PAD	187,354,973	Bulan	12	Kota Banda Aceh, Balturrahmen, Kampung Baro	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2002	2.08	18 01	2 1	
1,190,000,000	Bulan	12	PAO	1,190,000,000	Bulan	12	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	0002	2.08	2	18	2
1,377,354,979	×	160	945	1,577,354,873	×	15	tida beek Asik, Debumbinan, Kanpung baro	Perrantasa pemenuhan Penyadian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kagistan Penyedisan Jase Pananjang Unusan Pemerintah Dasrah		2.08	2		2
8,036,500	Unit	<del>1</del>	PAD	8,036,500	Unit	L+	Kota Banda Acah, Baiturrakman, Kampung Baro	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	00100	2.07	2	18	2
59,537,582	Unit	8	PAD	59,537,582	Unit	50	Kota Banda Aceh, Baiturrahman, Kampung Baro	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Sub Kegiatan Pengadaan Peralakan dan Mesin Lainnya	0006	2.07	22	18	~
67,57 <b>,08</b> 2	×	120	PAD	67,574,682	×	Ę	I can band Arah, baharatana, Campang ban	Persentase pamenuhan kebutuhan Berang MSA Daerah Fenunjung Unusan Pemerintah Daerah	Kegistes Pengadaan Berang Milik Daurah Penunjang Unusan Pemerkntah Daerah		2.07	8	<b>5</b>	~

157,600,000	Dokumen	L L	PAD	157,600,000	Dokumen	1	Kota Banda Acah	Jumlah Sistem Informasi Perizinan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Sub Keglatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Pemanfaatan Bata dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanana Perizinan Berbasha Terintegrasi secara Elektronik	0002	2.01	8	18	2
157,600,000	×	ă	PAD	157,600,000	*	150	Kota Banda Acah	Jumiah Sistem Informasi Perizinan Berbasis Elektronik yang Terintagrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Kegiatan Pengalolaan Data dan Informasi Penzinan dan Non Pertilhan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupatan/Kota		2.01	8	18	2
157,600,000	×	58	PAG	157,600,000	×	ŧ	Kota Banda Aosh	Persentase Peningkatan Sistem Informesi Penanaman Model	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Model			8	뜛	~
19,578,800	Kegiatan Usaha	8	DAK	19,578,800	Kegiatan Usaha	30	Kota Banda Aceh	iumlah laporan Pelaksansan pengawasan Penanaman Modal	Sub Kegjatan Pengawasan Penanaman Modal.	0006	2.01	05	tă.	2
373,815,200	Pelaku Usaha	250	DAK	373,815,200	Pelaku Usaha	250	Kota Banda Aceh	Jumlah Laporan pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan	Sub Kegjatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	00%	2.01	8	is lie	2
40,000,000	Kegiatan Usaha	10	DAK	40,000,000	Kegiatan Usaha	10	Kota Banda Acah	Jumlah Laporan pemantauan	Sub Kegiatan Penyelesalan Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.	0004	2.01	S	18	2
900,466,669	×	ĕ	XVC	000 545 'EE5	×	\$	Kata Bende Amh	Jurriah Laporan Pengendalian Pelaksansan Penanaman Modal	Kaglatan Pengendalian Palabasaan Penenaman Modal yang menjadi Kawanangan Deerah Kabupaten/Kota		2.01	8	5	~
433, 394, 000	×	ğ	DAK	433,394,000	×	100	Kota Benda Acah	Persentase Nilai Penanaman Model	Program Pengendalian Pelaksansan Penanaman Modal			\$	<b>5</b>	~
54,820,000	Masyarakat	500	PAD	54,820,000	Masyarakat	56	Kota Banda Aceh	Jumlah masyarakat yang Dilayani untuk Konsultasi/Pengaduan yang Ditindaklanjuti	Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Jumlah masyarakat yang Dilayani untuk Pengaduan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Konsultasi/Pengaduan yang Ditindaklanjuti Berbasis Risiko	0007	2.01	8	18	~
75,298,164	Pelaku Usaha	200	PAD	75,298,164	Pelaku Usaha	200	Kota Banda Acah	Jumlah Pengawasan Tempat Usaha yang Memiliki Izin usaha	Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Pentriaan Jumlah Pengawasan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berbasis Risiko Memiliki izin usaha Terintegrasi secara Elektronik	806	2.01	£	<b>₩</b>	~
190,181,184	×	190	76	120, 111, 061	(apporte		Kata Benda Acah	Jumish Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penenamen Model	Kagbatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penananan Modal yang menjadi kewenangan Daarah Kabupaten/Kota		2.01	8	150	2
130,118,164	×	100	PΑD	130,118,164	*	100	Kota Banda Aceh	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat	Program Pelayenan Penanaman Model			£	F6	~
48,123,000	Dokumen	1	PAD	48, 123,000	Kali	1	Kota Banda Aceh	Jumlah Keikutsertaan Pameran investasi		0002	2.01	8	<b>15</b>	2
48,123,000	×	15	DAG	45,120,000	Laporan	1	Keta Banda Agah	Juniah Laporan Penyelenggatan Promosi Penuruman Modal	Kagistan Penyalenggaran Pronosi Pesananan Madal yang Manjad Kewerangan Daerah Kabupatan/ Kota		2.01	8	55	2
44, 123,000	zł.	000	PAD	49,123,000	*	58	Kota Benda Aceh	Persentase Promosi Penanaman Modal	Program Promosi Penanaman Modal			8	55	2

# BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2025 mengacu kepada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023 -2026, Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah kota Banda Aceh dan Hasil evaluasi Renja DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2023. Mengacu pada dokumen tersebut DPMPTSP kota Banda Aceh telah merumuskan 6 (enam) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 24 (Dua Puluh empat) Sub Kegiatan, beserta kerangka pendanaan indikatif. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP kota Banda Aceh yaitu "Mengoptimalkan Reformasi Bikrokrasi dan tata Kelola pemerintahan pada penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu", dengan sasaran Optimalnya Reformasi Bikrokrasi dan tata Kelola Pemerintahan pada penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dan tujuan "Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal" dengan sasaran jangka menengah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang kondusif melalui kebijakan Penanaman Modal.

#### 1. Program

DPMPTSP kota Banda Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi maka disusunlah program, kegiatan, dan sub kegiatan kerja dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5 – 1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, VAlidasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun kegiatan unggulan/prioritas DPMTPSP kota Banda Aceh tahun 2025, antara lain:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
- 2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- 3) Program Promosi Penanaman Modal;
- 4) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- 5) Program Pelayanan Penanaman Modal;
- 6) Program pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;

## 2. Kegiatan.

Sesuai dengan kebijakan program yang telah ditetapkan bersama, maka perlu ditetapkan bebrapa kegiatan untuk menunjang program – program yang telah ada. Untuk merealisasikan program – program diatas, ditetapkan kegiatan – kegiatn yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Kegiatan Administrasi Pegawaian Perangkat Daerah.
- 4) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 5) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 6) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 7) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 8) Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
- 9) Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota.
- 10) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 11) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota.
- 12) Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 13) Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- 14) Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

## 3. Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan bentuk penjabaran lebih lanjut atau prnerjemahan dari aktivitis atau layanan kegiatan di dalam pelaksanaan kewenangan daerah dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan kegiatan – kegiatan diatas, ditetapkan sub kegiatan – sub kegiatan yanag dilaksanakan antara lain:

1) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

- 2) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 4) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 6) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- 8) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 9) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 10) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 11) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 12) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 13) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 14) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 15) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 16) Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
- 17) Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 18) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
- 19) Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
- 20) Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Brusaha Berbasis Risiko.
- 21) Penyelesaian Permaslahan dan Hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya
- 22) Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha
- 23) Pengawasan Penanaman Modal

24) Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanana Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Tabel 4.1 Rencana Kerja, Pendanaan dan Kelompok Sasaran Tahun 2025

								1	wget	Pagu	Kelompok Setatuh
		Kode			Program den Kegieten	Inditiator Kinorja	Lotmal	Volume	Setuen	rage .	
<b>,</b>		(1)	,		(3)	(9)	[4]	(9)	[6]	(7)	(S)
		1	L.		Urvatır Perioristahan welli-yang tidak berketişin dungan polayayun Dasar						
Т	19	T			ОРМАРТИР					8,864,642,476	
	18	67			Program Penunjang Uruaan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemeruhan kebutuhan perunjang perengkat deemh	DPMPTSP	100	*	\$,CHE, 106, 312	DPMPTSP
T	18	Q1	201		Registan Perencensen, Perganggaran, den Svelussi Kinerja Perangkat Owersh	Persontane delauteen personassan, penganggaran dan evaluari OPD yang tertunun	DPMPTSP Kota Banda Acak	хоо	16	4,940,123	OPHFIS
1	18	01	2.01	0001	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	kumlah dokumen perencanaan yang disusun	OPMPTSP Kota Bands Aceh	3	Dokumen	4,940,123	DPMPTSP
	10	on	2.02		Kegistan Administrasi Kessengan Parangkat Daerah	Persentase persenuhan administrasi kewengan	DPNPTSP Kota Banda Aceh	100	*	6,385,546,155	Pagawal OPMPTSP
	14	01	2 02	0001	Sub Kegistan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah wektu pembayaran gaji dan tunjangan ASN yang disediekan	DP MPTSP Kota Benda Aceh	12	Bulan	5,378,873,118	Pagawai DPRAPTSP
2	18	B (21	2.03	2 0002	Sub Kegisten Penyedisan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah waktu Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran yang disediakan	DPMPTSP Kota Banda Aceh	1	Dokomen	906,675,000	Pegawal OPMPTSP
T	18	a	2.06		Kegistan Administral Pegawaian Perangkat Caerah	Persentuse personuhan Administrasi Kepagawalan Perangkat Oserah	DPMPTSP Kota Banda Acek	100	*	41,885,001	Pagawai DPMPTSP
	18	01	2 05	0002	Sub Kegiatan Pengadaan Pakalan Dinas beserte Atribut kelengkapannya	Jumlah Pekelan Dinas Beserta Perlengkapan-nya yang disediakan	DPMPTSP Kota Bende Aceh	0	Stel	43,835,000	Pagawal DPMPTSP
1	18	OQ.	1.00		Kegiotan Administrari Umum Perangkat Deerah	Persentasa pernenuhan terbutuhan penuajang administrati umum	OPNOTSP Hote Benda Assh	100	*	346,988,077	DPNPTSP
Ť	18	01	2 DG		Sub Keglaten Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	DPMPTSP Kota Banda Aceh	3	Junis	3,463,853	OPM#TSP
Ť	18	01	2 06	0004	Sub Keglatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Sahan Logistik Kantor yang disadiakan	DPMPTSP Kota Banda Aceh	6	Jenis	17,367,638	Masyarakat dan Pegawai DPMPTS
	18	m	2 06	0005	Sub Kaglatan Penyediaan Barang Catakan dan Penggandaan	jumlah jenis Barang Cetakan dan Penggandaan yang disadiakan	DPMPTSP Kota Banda Aceh	16	Jenis	76,156,586	ΩPMPTSP
	18	01	2 06	0009	Sub Kegiatan Panyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumiah laporan rapat koordinasi dan konsultasi ke Juar daerah yang dilaksanakan	OPMPTSP Kota Banda Aceh	24	Laporen	50,000,000	OPMPTSP
1	18	01	2.07		Kagistan Pengadaan Barang Milik Caerah Penunjang Urusan Pemerintah Saerah	Persentase pemersshari kebutuhan Sarang Milit Deersh Penunjarig Urusan Pemerintah Deersh	DPMP1SP Kota Banda Aosh	100	<b>N</b>	67,574,062	DPMPTSP
+-	18	01	2.07	0006	Sub Kegiatan Pengadkan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peraistan dan Mesin Lainnya yang disediakan	DPMPTSP Kota Banda Aceh	50	Unit	59,537,582	DPMPTSP
1	18	01	2.07		Sub Kagiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan tainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gadung Kentor atau Bengunan Lainnya yang disediakan	DPMPTSP Kota Banda Aceh	1	Unit	8,936,900	OPMPTSP
Ť	19	01	2.00		Kegletan Penyediaan Jese Panunjang Unusan Pemerintah Deerah	Personana pemanuhan Panyadiaan Jasa Personjang Urusan Pemerintahan Deerah	DPMPTSP Kets Bands Acah	too	*	1,877,354,979	CPMPTSP
+	18	01	2.08	0002	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikas), Sumber Daya Air dan Listrik	Jumiah waktu Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	DPMPTSP Kota Banda Acah	12	Bulan	1,190,000,000	OPMPTSP
+	18	01	2.08	0004	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Palayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Palayanan Umum Kantor	DPMPTSP Kota Banda Aceh	12	Buien	187,354,973	DPMPTSP

2	18	Œ	2.09		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutahan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penanjang Urusan Pemerintahan Daerah	DPMPTSF Kota Benda Aceh	100	*	131,865,939	DPMPTSP
2	18	01	2.09		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pemelharaan, Pembayaran Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DPMPTSP Kota Banda Aceh	1	Unit	43,670,000	DPM#TSP
2	18	on	2.09	0006	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	DPMPTSP Kota Banda Aceh	53	Unit	69,389,474	DPMPTSP
2	18	01	2.09		•	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dilaksanakan	DPMPTSP Kota Banda Aceh	32	Unit	18,906,465	DPMPTSP
2	18	Œ			Program Pengsimbangan Milm Penananian Modal	Persentase Pengembergan littim Penenenan Model	Banda Aceh	100	*	37,000,000	Aparatur, masyaraket den investor
2	18	Œ.	201			Jumlah Penetapan Pemberian Fasilitas/insantif Dibidang Penanaman Model	čarda Aceh	300	*	20,000,000	Aparatur dan masyarakat
2	18	02	2.01	1	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Daerah Mengenal Pemberlan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumiah Penetapan Kebijakan Deerah Mengenai Pemberian Fasiktas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Banda Aceh	1	Dakumen	70,000,000	Aparatur dan masyarakat
2	18	Œ	202		Keglatao Pembuatan Peta Potensi investasi Kabupaten/Kota	Jumish Pembuatan Peta Potensi Penanaman Modal	Banda Aceh	100	×	17,000,000	Aparetur dan Investor
2	18	œ	2.02		Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota yang dikeluarkan	Banda Aceh	1	Dokumen	17,000,000	Aparatur dan Investor
1	18	<b>0</b> 8			Program Promosi Penanansan Model	Persentase Promosi Persensen Modal	Benda Acth	100	*	46,123,000	Investor
2	18	æ	2.01		Kegtatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewanangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumish Laporan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal	Banda Aceh	100	*	44,123,000	Investor
2	18	03	2.01		Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keikutsertaan Pameran investasi	Banda Aceh	1	Ka	48,123,000	Investor
2	18	04			Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Tinglat Kapussan Masyaralat	Banda Aceh	100	×	130,118,164	Pelaku Usaha dan Masyarakat
3	18	O4	2.01		Kegistan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bildang Penanaman Modal yang menyadi kewanangan Doorah Kabupatan/Kota	Jumiah Pelayanan Pertahan dan Nonpertahan Secara Terpadu Satu Pintu Obidang Penanaman Modal	Banda Aceh	100	%	130,118,164	Pelaku Usaka dan Masyarakat.
2	18	04	201		Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perlainan Berusaha melalui Sistem Perlainan Berbasis Risako Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pengswasan Tempat Usaha yang Memiliki Izin usaha	Banda Aceh	200	Pelaku Usaha	75,298,164	Petaku Usaha
2	18	04	201		Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Pengaduan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah masyarakat yang Dilayahi untuk Konsultasi/Pengaduan yang Ditindaklanjuti	Banda Aceh	500	Masyarakat	54,820,000	Masyarakat

2	13	05			Program Pengendelian Pelaksansan Penanaman Modal	Penestase Milai Penanoman Modal	Banda Aceh	100	*	433,394,000	Investor
2	18	05	201	1	Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Duerah Kabuputen/Kota	Jumbah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Banda Aceh	180	*	433,394,000	investor
2	18	05	2.01	1	Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya.	Jumlah Laporan pemantauan	Banda Aceh	1	Laporan	40,000,000 :	investor
2	18	05	2.01	0005	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha.	Jumlah Laporan pelaku usaha yang telah mendapatkan pembinaan	Banda Aceh	1	Laporan	373,815,200	Investor
2	18	05	2.01	0006	Sub Kegiatan Pengawasan Penanaman Modal.	Jumlah laporan Pelaksanaan pengawasan Penanaman Modal	Banda Aceh	1	Laporan	19,578,800	In <b>ve</b> stor
2	18	06			Program Pengelolaan Data dan Sistam Informasi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Sistem Informati Penanumun Modal	Banda Aceh	190	×	157,600,000	Pelaku Usaha
2	18	06	201	1	Kegistan Pengelolaan Outs dan Informasi Perlzinan dan Hon Perlzinan yang Terintzeyasi pada Tingtak Duerah Kabupaten/Kota	Jumish Sistem Informasi Perizinan Berbasis Elektronik yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Banda Aceh	100	×	157,800,000	Pelaku Usaha
2	18	06	2.01		Sub Kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanana Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Sistem Informasi Perizinan Berbasis Elektronik yang Terintagrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Banda Aceh		Dokumen	157,600,000	Pelaku Usaha

BAB. V PENUTUP

Dokumen Rancangan Awal Renja DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2025

merupakan dokumen perencanaan tahunan yang digunakan sebagai landasan operasional

program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota

Banda aceh. Rencana kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan Pembangunan urusan

Pemerintahan bidang Penanaman Modal untuk mendukung arah Pembangunan Daerah,

selain itu juga dalam rangka menunjang keberhasik=lan stategis daerah Kota Banda Aceh.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya

sinergitas kinerja pembangunan diantara semua pihak yang terkait, maka seluruh Bidang

dan Sekretariat pada DPMPTSP kota Banda Aceh, berkewajiban untuk melaksanakan

program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Renja DPMPTSP kota

Banda Aceh Tahun 2025, secara sinergitas dan terintegrasi.

Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBK Tahun 2025, Rancangan Awal Renja

DPMPTSP kota Banda Aceh Tahun 2025 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA) Tahun 2025. Guna menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi,

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang di lingkungan DPMPTSP

kota Banda Aceh wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja

Tahun 2025, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan melakukan koreksi yang

diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala

Dinas, Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya,

perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,

sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan.

Banda Aceh, 24 November 2023

Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Andri. S.STP., M.Si

Pembin / NIP. 19840323 200212 1 002

34